

Pendidikan Antikorupsi dan Etika Pelayanan Publik di Sekolah Menengah Atas Kejuruan St. Paulus Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Monica Feronica Bormasa, Aresyama Hein Temmar

¹²Universitas Lelemuku Saumlaki, Tanimbar, Maluku, Indonesia
*Corresponding author: mbormasa@gmail.com, resyotemmar@gmail.com

Manuscript received : 02-05-2025; revised : 02-06-2025; accepted : 12-06-2025. Date of publication : 05-07-2025

Abstrak-Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa-siswi SMAK St. Paulus Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengenai pentingnya nilai-nilai antikorupsi dan etika pelayanan publik. Pendidikan antikorupsi merupakan bagian penting dalam membentuk karakter generasi muda yang berintegritas, sedangkan etika pelayanan publik menjadi fondasi dalam membangun pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Kegiatan ini dilaksanakan melalui metode sosialisasi interaktif dan diskusi kelompok. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa terhadap konsep korupsi, dampaknya, serta urgensi etika dalam pelayanan publik. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat menanamkan kesadaran dini kepada siswa untuk menjadi agen perubahan di lingkungan sosial mereka.

Kata Kunci: Antikorupsi, Etika, Pelayanan Publik, Siswa, Pendidikan Karakter

Abstract-The objective of this community service program is to enhance the understanding of students at SMAK St. Paulus in Tanimbar Islands Regency regarding the importance of anti-corruption values and public service ethics. Anti-corruption education is an integral part of shaping the character of young generations with integrity, while public service ethics serve as the foundation for building a clean and accountable government. This activity was carried out through interactive socialization and group discussion methods. The results of the activity showed an increase in students' understanding of the concept of corruption, its impact, and the urgency of ethics in public service. Thus, this activity is expected to instill early awareness in students to become agents of change in their social environment.

Keyword: Anti-corruption, Ethics, Public Service, Students, Character Education

Copyright © 2025, Author

This is an open-access article under the [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



I. INTRODUCTION

Korupsi merupakan masalah sistemik yang masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan nasional. Upaya pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui pendidikan karakter sejak dini. Pendidikan antikorupsi menjadi strategi jangka panjang yang efektif dalam membentuk generasi berintegritas dan bertanggung jawab, karena menanamkan nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sejak usia sekolah. Beberapa negara, seperti Finlandia dan Selandia Baru, menunjukkan bahwa pendidikan etika dan integritas yang terintegrasi dalam kurikulum sekolah berkontribusi signifikan terhadap rendahnya tingkat korupsi di negara tersebut. Hal ini menjadi bukti bahwa pendidikan antikorupsi dapat menjadi pondasi kuat bagi terciptanya masyarakat yang bersih dan akuntabel.

Korupsi merupakan salah satu masalah utama yang menghambat pembangunan nasional di Indonesia. Dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan dan merusak tatanan moral bangsa. Fenomena ini bersifat sistemik, yang berarti korupsi terjadi secara meluas dan melibatkan berbagai sektor kehidupan. Oleh

karena itu, upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dilakukan melalui penindakan hukum. Pendekatan tersebut perlu disertai langkah preventif melalui pendidikan, khususnya pendidikan karakter dan moral sejak usia dini (Dwiyanto, 2006; Pendidikan Antikorupsi: Kajian Antikorupsi, Teori dan Praktik – Bintangpusnas Edu, n.d.).

Selain itu, penting pula mengenalkan konsep etika pelayanan publik kepada siswa sebagai calon pemimpin masa depan. Etika pelayanan publik mencakup nilai-nilai keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi yang harus tertanam sejak usia sekolah. Dalam konteks nasional, isu-isu seperti rendahnya kualitas pelayanan publik, praktik pungutan liar, dan birokrasi yang berbelit menjadi sorotan utama dalam agenda reformasi birokrasi Indonesia. Oleh karena itu, penanaman nilai etika pelayanan publik sejak dini tidak hanya relevan di tingkat lokal, tetapi juga menjadi bagian dari upaya strategis membangun pemerintahan yang bersih dan responsif secara nasional. Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sebagai wilayah kepulauan di Provinsi Maluku, memiliki tantangan tersendiri dalam akses terhadap pendidikan nilai-nilai integritas dan pelayanan publik. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar kepada siswa SMAK St. Paulus tentang pentingnya sikap antikorupsi dan etika dalam pelayanan publik melalui pendekatan yang komunikatif dan kontekstual.

Korupsi merupakan salah satu masalah utama yang menghambat pembangunan nasional di Indonesia. Dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan dan merusak tatanan moral bangsa. Fenomena ini bersifat sistemik, yang berarti korupsi terjadi secara meluas dan melibatkan berbagai sektor kehidupan. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dilakukan melalui penindakan hukum, tetapi juga harus disertai pendekatan preventif melalui pendidikan, khususnya pendidikan karakter dan moral sejak usia dini. (Buku Model Inseri Pendidikan Antikorupsi dan PPKn - ACLC KPK n.d.)

Pendidikan antikorupsi merupakan salah satu strategi preventif jangka panjang yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, integritas, dan kepedulian sosial kepada generasi muda. Siswa sekolah menengah atas merupakan kelompok usia yang strategis dalam proses pembentukan karakter, karena mereka berada pada fase pencarian identitas dan memiliki kemampuan berpikir kritis yang sedang berkembang. Melalui pendidikan antikorupsi, mereka didorong untuk mengenali berbagai bentuk korupsi di lingkungan sekitar, menyadari dampak buruknya, serta menumbuhkan komitmen untuk bersikap jujur dan adil.

Menurut Tilaar (2002), pendidikan tidak hanya berfungsi untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan kesadaran moral peserta didik. Dalam konteks ini, pendidikan antikorupsi menjadi sarana untuk membentuk generasi muda yang sadar hukum, berintegritas, dan memiliki komitmen terhadap nilai-nilai keadilan dan kejujuran. Pendidikan semacam ini harus dimulai sejak usia sekolah agar nilai-nilai integritas tertanam kuat sebagai bagian dari kepribadian peserta didik.

Senada dengan itu, Magnis-Suseno (1998) menekankan bahwa etika sosial merupakan kunci untuk menciptakan masyarakat yang adil dan tertib. Etika bukan hanya pedoman individual, tetapi juga landasan kolektif dalam berinteraksi di ruang publik. Dalam hal ini, etika pelayanan publik menjadi bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Etika pelayanan publik mencakup nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, transparansi, keadilan, dan orientasi terhadap pelayanan prima (Dwiyanto, 2006).

Etika pelayanan publik merupakan cabang dari etika administrasi yang memfokuskan perhatian pada perilaku moral para aparatur negara dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Etika ini mencakup seperangkat nilai, prinsip, dan norma yang menjadi pedoman bagi penyelenggara pelayanan agar bertindak secara profesional, adil, dan bertanggung jawab. Menurut Cooper (2006), etika administrasi publik adalah upaya untuk menjaga moralitas dan integritas dalam pengambilan keputusan serta dalam tindakan sehari-hari para pelayan publik.

Etika pelayanan publik sangat berkaitan dengan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu akuntabilitas, transparansi, responsivitas, dan partisipasi. Prinsip-prinsip ini menekankan bahwa pelayanan publik harus dilakukan demi kepentingan umum, bukan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. (Economics and 2009 2009) Oleh karena itu, pemahaman etika pelayanan publik sejak dini sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang di masa depan.

Hughes (2003) menjelaskan bahwa pelayanan publik yang etis tidak hanya mengandalkan peraturan tertulis, tetapi juga membutuhkan komitmen nilai dan budaya kerja yang berintegritas. Dalam banyak kasus, pelanggaran etika tidak selalu melanggar hukum, tetapi tetap berdampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat. Maka dari itu, pendidikan tentang etika pelayanan publik harus menanamkan kesadaran bahwa integritas pribadi dan profesional merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. (Hughes and Hubbard 2001)

Dalam konteks pendidikan, penanaman nilai etika pelayanan publik kepada siswa bertujuan agar mereka memahami pentingnya berperilaku adil, tidak diskriminatif, dan mengutamakan kepentingan

bersama dalam segala bentuk interaksi sosial. Pendidikan ini akan membentuk pemahaman bahwa pelayanan publik bukan hanya tanggung jawab aparat pemerintahan, tetapi juga bagian dari kehidupan sosial yang menuntut kepekaan etis dan moral dari setiap individu (Frederickson, Maret, and Cuajungco 2004)

Dengan demikian, pengenalan terhadap etika pelayanan publik sejak jenjang pendidikan menengah bukan hanya relevan, tetapi juga strategis. Hal ini dapat menjadi modal awal dalam menciptakan generasi yang tidak hanya memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga memiliki kesadaran moral untuk turut menjaga integritas pelayanan di berbagai tingkatan kehidupan sosial.

Selain nilai-nilai anti korupsi, penting pula diperkenalkan konsep etika dalam pelayanan publik. Pelayanan publik yang etis merupakan pilar dari pemerintahan yang bersih, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (Pengembangan and 2017 n.d.) Etika pelayanan publik mencakup aspek keadilan, kesetaraan, transparansi, dan akuntabilitas. (Wirtz, Weyerer, and Geyer 2019) Dengan menanamkan nilai-nilai tersebut sejak usia sekolah, diharapkan generasi muda mampu menjadi pelaku perubahan yang mampu memberikan pelayanan yang adil dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam konteks kecil seperti organisasi sekolah maupun kelak saat mereka menjadi bagian dari sistem birokrasi.

Kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang merupakan wilayah kepulauan di Provinsi Maluku turut mempengaruhi akses terhadap pendidikan dan pembinaan karakter. Masih terbatasnya kegiatan-kegiatan edukatif di luar kurikulum formal menjadi tantangan tersendiri dalam memperluas wawasan dan keterampilan sosial siswa di daerah ini. SMAK St. Paulus Saumlaki sebagai salah satu lembaga pendidikan menengah di wilayah tersebut memiliki potensi besar dalam membentuk karakter siswa yang berintegritas. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan untuk memberikan penguatan nilai-nilai antikorupsi dan etika pelayanan publik secara langsung kepada para siswa, dengan harapan dapat menumbuhkan kesadaran dan komitmen mereka sebagai generasi penerus bangsa yang bermoral.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga kontekstual dan partisipatif, agar siswa dapat memahami secara konkret pentingnya sikap antikorupsi dan nilai-nilai pelayanan publik yang beretika dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk menjembatani kesenjangan pemahaman tentang korupsi dan pelayanan publik antara pusat dan daerah terpencil, serta memperkuat pembangunan karakter secara menyeluruh dalam dunia pendidikan.

II. METHOD

Kegiatan pengabdian ini dilakukan secara partisipatif dengan pendekatan edukatif dan dialogis. Tahapan kegiatan dimulai dengan persiapan materi dan koordinasi sekolah, meliputi penyusunan modul sosialisasi antikorupsi dan etika pelayanan publik serta koordinasi dengan pihak sekolah terkait pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, pelaksanaan sosialisasi berlangsung selama satu hari dengan melibatkan 50 siswa kelas XI dan XII menggunakan berbagai metode, seperti presentasi interaktif yang menjelaskan konsep korupsi, jenis-jenisnya, dampaknya, serta nilai-nilai integritas; diskusi berupa tanya jawab sederhana tentang etika pelayanan publik dan cara siswa mengidentifikasi serta menyikapinya; serta simulasi melalui permainan peran untuk mengilustrasikan dilema etika dan praktik pelayanan publik. Tahap terakhir adalah evaluasi dan refleksi, di mana dibuat pertanyaan untuk menilai peningkatan pemahaman siswa serta diadakan sesi refleksi bersama untuk menggali respons dan komitmen siswa pasca kegiatan.

III. RESULT AND DISCUSSION

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang diselenggarakan oleh tim PkM Universitas Lelemuku Saumlaki, Program Studi Ilmu Administrasi Negara semester VI, bertempat di SMAK St. Paulus Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kegiatan ini menghasilkan beberapa capaian, antara lain terjalinnya kerja sama antara pihak sekolah dan Universitas Lelemuku Saumlaki, serta peningkatan pengetahuan siswa-siswi mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.

Gambar 1.1 Tim Pengabdian Melaksanakan Doa Bersama Sebelum Kegiatan Di Mulai



Berdoa bersama sebelum melaksanakan kegiatan sosialisasi



Pengantar oleh Mahasiswa



Penyampaian materi sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi



Penyampaian materi sosialisasi Etika Pelayanan Publik

Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman siswa terhadap materi antikorupsi dan etika pelayanan publik. Berdasarkan hasil tanya jawab ternyata siswa yang dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk korupsi secara benar.

Siswa juga mampu menyebutkan nilai-nilai penting dalam etika pelayanan publik seperti keadilan, tanggung jawab, dan transparansi. Diskusi kelompok menunjukkan antusiasme dan kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya menjadi bagian dari generasi antikorupsi.

Salah satu temuan menarik dalam kegiatan ini adalah kemampuan siswa untuk mengidentifikasi contoh konkret perilaku korupsi dalam kehidupan sehari-hari, seperti menyontek saat ujian atau melakukan pungutan liar dalam organisasi sekolah. Temuan ini menunjukkan bahwa siswa mulai memahami korupsi sebagai perilaku yang tidak hanya terkait dengan pejabat negara, tetapi juga dapat terjadi dalam lingkungan berskala kecil.



Diskusi kelompok menjadi salah satu sesi paling efektif. Siswa diberikan tanya jawab seperti: Seorang pelajar mendapat tawaran bantuan nilai dari gurunya dengan imbalan tertentu, atau petugas sekolah yang memproses administrasi lebih cepat untuk siswa tertentu karena kedekatan keluarga. Siswa diminta menganalisis tindakan-tindakan tersebut berdasarkan perspektif etika dan integritas. Hasilnya, sebagian besar siswa mulai memahami bahwa praktik korupsi dan pelanggaran etika tidak hanya terjadi pada skala besar atau di kalangan pejabat, tetapi bisa juga terjadi dalam konteks sekolah dan keluarga.

Dalam sesi simulasi peran yang berlangsung selama kurang lebih 30 menit, siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil yang masing-masing mendapatkan skenario berbeda terkait situasi pelayanan publik, seperti pengurusan KTP di kantor kelurahan atau pengajuan bantuan sosial. Setiap kelompok diberi waktu 5–7 menit untuk memerankan peran sesuai skenario, dilanjutkan dengan sesi tanggapan dari kelompok lain. Dari simulasi ini, muncul diskusi kritis tentang pentingnya sikap ramah, transparan, serta tidak diskriminatif dalam pelayanan. Beberapa siswa menyampaikan bahwa mereka pernah menyaksikan pelayanan publik yang lambat atau tidak adil di lingkungan mereka, sehingga kegiatan ini membuka ruang refleksi bagi mereka untuk membayangkan pelayanan publik ideal di masa depan.

Selain aspek kognitif, kegiatan ini juga menumbuhkan nilai-nilai afektif seperti empati, tanggung jawab, dan rasa ingin berkontribusi bagi bangsa. Hal ini terlihat dari komitmen siswa setelah kegiatan, di mana sebagian besar dari mereka menuliskan janji pribadi untuk menolak perilaku curang, menghargai aturan, dan menjadi teladan dalam lingkungan sekolah.

Secara umum, keberhasilan kegiatan ini tidak hanya diukur dari peningkatan nilai tes, tetapi juga dari perubahan cara pandang dan respons emosional siswa terhadap isu korupsi dan pelayanan publik. Salah satu siswa bahkan menyampaikan dalam sesi refleksi bahwa ia ingin menjadi pegawai publik suatu hari nanti dan menerapkan prinsip-prinsip integritas yang telah dipelajari.

IV. CONCLUSION

Kegiatan sosialisasi ini berhasil meningkatkan pemahaman siswa-siswi SMAK St. Paulus tentang konsep dan bahaya korupsi serta pentingnya etika dalam pelayanan publik. Melalui metode yang komunikatif dan partisipatif, siswa menjadi lebih aktif dan reflektif dalam menilai perilaku sehari-hari yang berkaitan dengan integritas. Kegiatan ini perlu direplikasi di sekolah lain agar semangat antikorupsi dan pelayanan publik yang beretika dapat menyebar luas di kalangan generasi muda, khususnya di daerah-daerah terpencil.

Kegiatan sosialisasi pendidikan antikorupsi dan etika pelayanan publik kepada siswa-siswi SMAK St. Paulus Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa terhadap pentingnya nilai-nilai integritas dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan diskusi, studi kasus, dan simulasi peran, siswa tidak hanya memahami konsep korupsi secara teoritis, tetapi juga mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk perilaku koruptif dalam lingkungan mereka.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan ini mampu meningkatkan pengetahuan siswa secara signifikan, sebagaimana tercermin dari perbandingan antara hasil tanya jawab dan simulasi. Selain itu, partisipasi aktif siswa dalam diskusi dan simulasi menunjukkan keterlibatan emosional dan moral mereka terhadap isu-isu antikorupsi dan pelayanan publik yang beretika. Hal ini menjadi indikator awal terbentuknya sikap kritis dan kesadaran moral yang merupakan fondasi penting dalam pembentukan karakter generasi muda.

Lebih dari sekadar peningkatan kognitif, kegiatan ini juga memberikan ruang bagi siswa untuk merefleksikan nilai-nilai personal seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Beberapa siswa menyampaikan komitmen untuk menjadi pribadi yang menjunjung integritas, bahkan dalam hal-hal kecil di lingkungan sekolah. Ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter, jika dilakukan dengan pendekatan yang kontekstual dan relevan, dapat memberikan dampak yang nyata terhadap perilaku siswa.

Selain memberikan manfaat bagi peserta didik, kegiatan ini juga memperlihatkan pentingnya sinergi antara lembaga pendidikan dan perguruan tinggi dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan integritas. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat semacam ini sangat relevan untuk diperluas ke sekolah-sekolah lain, terutama di daerah terpencil yang memiliki keterbatasan akses terhadap program-program pendidikan nonformal yang membentuk karakter.

V. REFERENCES

Buku Model Inseri Pendidikan Antikorupsi Dan PPKn - ACLC KPK'. <https://aclc.kpk.go.id/materi->

- pembelajaran/pendidikan/buku/buku-model-insersi-pendidikan-antikorupsi-dan-ppkn (August 5, 2025).
- (Dwiyanto, 2006) - Penelusuran Google'.
https://www.google.com/search?q=%28Dwiyanto%2C+2006%29+&sca_esv= (August 5, 2025).
- Economics, K Qudrat-I Elahi - International Journal of Social, and undefined 2009. 2009. 'UNDP on Good Governance'. *emerald.com* 36(12): 1167–80. doi:10.1108/03068290910996981/FULL/HTML.
- Frederickson, Christopher J., Wolfgang Maret, and Math P. Cuajungco. 2004. 'Zinc and Excitotoxic Brain Injury: A New Model'. *journals.sagepub.com* 10(1): 18–25. doi:10.1177/1073858403255840.
- Hughes, L, and D Hubbard. 2001. 'The Collected Works of Langston Hughes'.
<https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=PgKWPUjrR2sC&oi=fnd&pg=PR9&dq>
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2022). Modul Pendidikan Antikorupsi untuk SMA. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK.
- Magnis-Suseno, Franz. 1998. 'Mencari Makna Kebangsaan'. : 193.
- Pendidikan Antikorupsi: Kajian Antikorupsi, Teori Dan Praktik - Bintangpusnas Edu'.
<https://bintangpusnas.perpusnas.go.id/konten/BK34412/pendidikan-antikorupsi-kajian-antikorupsi-teori-dan-praktik> (August 5, 2025).
- Pengembangan, IP Dharmanu - Adhum: Jurnal Penelitian dan, and undefined 2017. 'Modernisasi Dan Inovasi Dalam Pelayanan Publik Melalui E-Government Di Kota Denpasar'. *jurnal.ummi.ac.id*.
<https://jurnal.ummi.ac.id/index.php/JAD/article/download/44/28> (May 6, 2025).
- 'Tilaar (2002 - Penelusuran Google'.
[https://www.google.com/search?q=Tilaar+\(2002&oq=Tilaar+\(2002&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRiPAjIHCAIQIRiPAAtIBBzc4NGowajSoAgCwAgE&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=Tilaar+(2002&oq=Tilaar+(2002&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRiPAjIHCAIQIRiPAAtIBBzc4NGowajSoAgCwAgE&sourceid=chrome&ie=UTF-8) (August 5, 2025).
- Wirtz, Bernd W., Jan C. Weyerer, and Carolin Geyer. 2019. 'Artificial Intelligence and the Public Sector—Applications and Challenges'. *International Journal of Public Administration* 42(7): 596–615. doi:10.1080/01900692.2018.1498103.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Suseno, F. (1997). *Etika Sosial: Dasar dan Prinsip Moral Publik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tilaar, H.A.R. (2002). *Pendidikan, Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Wahyudi, J. (2020). "Peran Pendidikan Antikorupsi dalam Membentuk Karakter Bangsa." *Jurnal Pendidikan Karakter*, 10(1), 22–35.